

Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Dalam Pengelolaan Aset Dan Barang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara

Yohanes Tamelab¹, Aplonia Pala², Anita Lassa^{2*}, Agustinus Longa Tiza³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Email: yohanestamelab@gmail.com¹, aploniamenteiro@yahoo.co.id²,
anitalassa2@gmail.com^{2*}, aguslongatiza@gmail.com³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dalam pengelolaan aset dan barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi SIMDA-BMD cukup efektif untuk digunakan dalam pengelolaan Aset dan Barang di Kantor Badan Kesbangpol. Hal ini dapat dilihat dari bentuk aplikasi yang relevan dengan kebutuhan dan cukup membantu. Belum ada SOP khusus berkaitan dengan penggunaan SIMDA-BMD dan yang digunakan dalam pengelolaannya adalah buku panduan pengisian. Selain itu juga ada beberapa data yang belum cepat terinput dipengaruhi oleh sebagian aset masih bersifat manual dan masih menindaklanjuti temuan BPK. Aplikasi SIMDA-BMD cukup efektif dalam membantu pengelolaan aset dan barang karena cukup akurat. Namun perlunya pemutakhiran aplikasi tersebut dari *offline* ke *online* sehingga apabila ada perubahan aset dan barang karena adanya perbaikan dapat diperbaharui secara berkala. Aplikasi SIMDA-BMD terbaru cukup lengkap dan memenuhi kebutuhan penerapan basis aktualsebagai PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP No.24 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Aplikasi SIMDA-BMD memiliki sistem proteksi data yang baik dan sesuai dengan peraturan perbendaharaan dan keuangan nasional. Selain itu juga aplikasi ini valid karena sering dilakukan pembaharuan sistem secara berkala. Aplikasi mudah dan cepat dalam penginputan serta data yang diinput langsung diberi peringatan apabila tidak cocok agar tidak ada kesalahan dalam penginputan.

Kata Kunci: Efektivitas, SIMDA-BMD, Pengelolaan, Aset.

Abstract

The purpose of this study was to describe and analyze the effectiveness of using the Regional Property Management Information System (SIMDA-BMD) in managing assets and goods at the National and Political Unity Agency of TTU Regency. The research method used is qualitative. The results of the study show that: The SIMDA-BMD application is effective enough to be used in asset and property management at the Kesbangpol Office. This can be seen from the application form that is relevant to the needs and quite helpful. There is no specific SOP related to the use of SIMDA-BMD and what is used in its management is the filling guide book. In addition, there are also some data that have not been inputted quickly, which is influenced by some assets that are still manual in nature and are still following up on BPK's findings. The SIMDA-BMD application is quite effective in helping the management of assets and goods because it is quite accurate. However, it is necessary to update the application from offline to online so that if there are changes in assets and goods due to repairs, they can be updated regularly. The latest SIMDA-BMD application is quite complete and fulfills the need for the application of the accrual basis in accordance with PP No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards as a replacement for PP No. 24 of 2005, and Minister of Home Affairs Regulation No. 64 of 2013 concerning the Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards in Local government. The SIMDA-BMD application has a good data protection system and complies with national treasury and financial regulations. In addition, this application is valid because the system is updated regularly. The application is easy and fast in inputting and the inputted data is immediately given a warning if it does not match so that there are no errors in inputting.

Keywords: Effectiveness, SIMDA-BMD, Management, Assets.

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban atas BMD kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMD memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Dalam kerangka otonomi daerah, peranan manajemen aset sangat vital karena dalam pengelolaan aset pemerintah kabupaten diperlukan perencanaan yang matang mulai dari rencana pengadaan, pemanfaatan, sampai dengan penghapusan. Pembuatan perencanaan pengelolaan aset pemerintah kabupaten ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebelum aset tersebut diketahui nilai wajarnya, sehingga dapat dilakukan optimalisasi terhadap pengelolaan aset pemerintah kabupaten. Dengan mengetahui nilai wajar dari aset pemerintah kabupaten, maka kasus-kasus transaksi tukar guling antara pemerintah kabupaten dengan pihak lain yang seringkali merugikan pihak pemerintah kabupaten dapat diminimalkan karena terjadi pertukaran berdasarkan nilai yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan umum yang sering terjadi pada pemerintah kabupaten di Indonesia dalam pengelolaan BMD adalah belum ada penerapan aturan atau tata cara pengelolaan BMD yang mengakibatkan BMD belum dapat diinventarisasi secara tepat dan tidak memiliki data yang valid, ditambah lagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih sangat terbatas dan kurang ahli/kurang terlatih serta mental korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih sangat sulit dihilangkan (Lulu, Lassa, Uskono, dan Aplonia, 2020). Hal ini mengakibatkan barang yang dikelola oleh pemerintah kabupaten cenderung tidak optimal dalam penggunaan dan pemanfaatannya. (Rorimpandey, Nangoy, dan Manossoh, 2017).

Dampak dari sisi ekonominya adalah tidak diperolehnya pendapatan yang seimbang dengan nilai barang yang dimiliki. Sedangkan dampak dari sisi keamanan atau hukum terhadap barang yang tidak teradministrasi dengan baik, seperti tidak lengkapnya dokumen kepemilikan akan mengakibatkan hilangnya aset dari tangan pemerintah kabupaten. Dengan pengelolaan barang atau aset yang baik diharapkan manajemen aset menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk pengamanan administratif, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMD. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*). Sistem penatausahaan BMD di Kabupaten TTU khususnya Badan KESBANGPOL berubah setiap waktu yaitu:

1. Sistem manual merupakan sistem pertama dan baru berakhir pada tahun 2015 yang digunakan dalam pengelolaan dan pelaporan aset/barang. Dalam sistem ini semua siklus pengelolaan BMD sepenuhnya bersifat manual karena pengelola barang belum mengenal sistem aplikasi dan jaringan internet sehingga tidak ada keteraturan pengadministrasian BMD yang menyebabkan sebagian BMD statusnya bermasalah dan menjadi temuan BPK.
2. Sistem Informasi Manajemen Barang Timor Tengah Utara (SIMBATTU) merupakan sistem yang digunakan dari tahun 2016–2018 dan aplikasi tersebut membantu pengelolaan BMD menjadi mudah karena dapat menginput aset dan barang yang sudah ada dan yang akan diadakan, namun tidak ada sinkronisasi nilai laporan BMD dan laporan keuangan. Hal tersebut menjadi temuan BPK saat pelaksanaan audit.
3. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) digunakan dari tahun 2019-sekarang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Tim pengembang BPK dan penggunaannya sudah menjangkau seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Aplikasi tersebut sudah sangat membantu dalam pengelolaan dan pelaporan aset BMD namun sebagian data asset masih tetap manual karena setelah melakukan kegiatan inventarisasi aset BMD ditemukan 1 (satu) unit Irigasi yang tercatat namun tidak dapat ditelusuri karena tidak memiliki informasi data yang akurat seperti lokasi, tahun pengadaan dan ukuran.

Menurut Scott (2002), dalam bukunya Prinsip-Prinsip Sistem Informasi bahwa sistem informasi

manajemen adalah: serangkaian sub sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang ditetapkan. Sistem informasi manajemen BMD yang digunakan berfungsi mengumpulkan dan mengolah data aset/barang milik daerah serta mengeluarkannya dalam bentuk laporan. Karena begitu pentingnya sistem informasi manajemen BMD bagi Pemerintah Kabupaten TTU untuk mendukung inventarisasi, maka evaluasi terhadap sistem informasi manajemen BMD dianggap perlu dengan tujuan adalah untuk mengetahui apakah Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) yang berjalan telah efektif dan efisien dalam mendukung inventarisasi aset di Kabupaten TTU dan memberikan usulan perbaikan dari hasil evaluasi penerapan sistem informasi manajemen BMD.

Pemerintah Kabupaten TTU melalui Badan Keuangan dan Aset (BKA) Kabupaten TTU telah melakukan sosialisasi tentang penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) kepada seluruh pengurus barang yang ada pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada bulan Januari tahun 2019 dan pada bulan Desember tahun 2019 juga Aplikasi SIMDA-BMD tersebut diterapkan walaupun belum ada payung hukumnya namun dengan maksud agar ada sinkronisasi antara laporan keuangan dan laporan aset untuk mengatasi terjadinya selisih nilai laporan keuangan dan laporan aset. Hal ini akan mempermudah laporan Pemerintah Kabupaten TTU untuk keluar dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada setiap tahun. Aplikasi ini dalam bentuk sistem informasi untuk melakukan manajemen barang daerah sesuai dengan siklus dan juga hak akses oleh bagian operator masing-masing OPD, khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten TTU juga menerapkan Aplikasi SIMDA-BMD Kabupaten TTU dalam penginventarisasi BMD. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola SIMDA-BMD, kurangnya pemahaman dalam pengelolaan BMD akibat dari mutasi pegawai yang telah mengikuti pelatihan pengelolaan SIMDA-BMD, dan terbatasnya fasilitas yang digunakan. Hal inilah yang menyebabkan kurang efektifnya pengelolaan aset dan BMD yang berada dibawah kewenangan KESBANGPOL Kabupaten TTU, dan dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1
Data Aset BMD Badan KESBANGPOL TTU Tahun 2019

No	Nama Aset	Jumlah	Tahun Perolehan	Status		Kode Masalah
				Bermasalah	Tidak Bermasalah	
1	TV Warna 17" inci	1	1997	√	-	M2
2	Fax Mile	2	1997	√	-	M2
3	Warles	1	2001	√	-	M2
4	Aipon	1	2002	√	-	M2
5	Meja Kerja	3	2002	√	-	M2
6	Kursi Plastik	14	2005	√	-	M2 dan M13
7	Suzuki Thunder	1	2006	-	√	-
8	Suzuki Thunder	1	2006	√	-	M1
9	Suzuki EN 125	1	2006	√	-	M16
10	Honda Mega Pro	1	2010	√	-	M2
11	Kain Gorden	1	2010	√	-	M2
12	Lemari Perpustakaan	1	2010	√	-	M2
13	Lemari Arsip	2	2010	√	-	M2
14	Meja Kerja	1	2010	√	-	M2
15	Kursi Kayu	1	2010	√	-	M7
16	Lemari Arsip	1	2010	√	-	M2
17	Lemari Rak Arsip	1	2010	√	-	M2
18	Memori 8 GB	2	2012	√	-	M7
19	Tas Handycame	2	2012	√	-	M7
20	Handycame 1 unit RB dan 2 unit hilang)	4	2012	√	-	M7 dan M10
21	Tas Kamera	4	2012	√	-	M7
22	Memory Camera 4 GB	4	2012	√	-	M7
23	Lemari Arsip	2	2012	√	-	M2
24	Meja Biro	9	2012	√	-	M2
25	Kursi Putar Tangan	4	2012	√	-	M2 dan M13
26	Kursi Kayu	1	2012	√	-	M2 dan M13
27	Toyota Rush GM/T	1	2013	-	√	-
28	Yamaha Byson	1	2013	-	√	-

29	Lap Top	1	2013	-	√	-
30	Lap Top (1 unit rusak berat)	3	2014	√	-	M10
31	Printer (2 unit hilang dan 2 unit lainnya rusak berat)	4	2014	√	-	M7 dan M10
32	Hardisk (1 buah hilang)	3	2014	√	-	M7
33	Hardisk (1 buah hilang)	3	2014	√	-	M10
34	Mesin Tik	1	2014	√	-	M2
35	Printer	2	2015	-	√	-
36	Komputer	2	2015	-	√	-
37	Meja	12	2015	-	√	-
38	Buku Bacaan	22	2016	-	√	-
39	Lap Top	2	2017	-	√	-
40	UPS/stabilizer	2	2017	-	√	-
41	Infocus	1	2017	-	√	-
42	Warles	1	2018	-	√	-
43	Handy Came	2	2018	-	√	-
44	Papan Data	7	2018	-	√	-
45	Viar	2	2019	-	√	-
46	Yamaha Freego	1	2019	-	√	-
47	Irigasi	1		√	-	M2 dan M7
Jumlah		141				

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU, 2021

Dari Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa aset yang dikuasai oleh Badan KESBANGPOL Kabupaten TTU memiliki permasalahan yang kompleks pada waktu pelaksanaan kegiatan inventarisasi aset yaitu BMD yang dikuasai oleh pihak ketiga dalam hal ini pensiunan ASN diberikode masalah M1, BMD tidak memiliki dokumen kepemilikan diberi kode masalah M2, BMD yang tidak ditemukan fisiknya diberi kode masalah M7, BMD yang rusak berat diberi kode masalah M10, BMD yang tidak memiliki dokumen dan nilainya dibawah satuan minimum diberi kode masalah M2 dan M13, BMD yang sudah diserahkan kepada masyarakat namun masih tercatat diberi kodemasalah M16. Sedangkan BMD yang tidak memiliki kode masalah dan BMD hasil pengadaan tahun 2019 menjadi data awal BMD untuk diinput pada sistem aplikasi SIMDA-BMD. Berdasarkan data hasil inventarisasi BMD tahun 2019 maka pada tahun 2020 atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap temuan pemeriksaan pengelolaan aset daerah tahun 2019. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dikemukakan adanya permasalahan aset daerah yang ada di KESBANGPOL Kabupaten TTU Tabel 2.

Tabel 2.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2019

No	Jenis Barang	Hasil Temuan
1	Kartu Inventaris Barang (KIB) B	Tanpa dokumen kepemilikan senilai Rp. 65.022.200,- dan diberi kode masalah M2
2	1 (satu) unit kendaraan roda 2	Dikuasai pihak lain dalam hal ini dikuasai oleh ASN yang pensiun tanpa melalui proses penghapusan dengan harga perolehan Rp. 22.000.000,- dan diberi kode M1 (sudah di tarik).
3	Aset daerah pada Kib B	Hilang senilai Rp. 78.683.000,- dan diberi kode M7

Sumber : Badan Kesbang dan Politik Kabupaten TTU, 2021

Berdasarkan Tabel2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 BPK RI melakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa Aset daerah pada Kartu Inventaris Barang (KIB) B tanpa dokumen kepemilikan senilai Rp. 65.022.200,- dan diberi kode masalah M2. Aset daerah pada pada KIB B yaitu 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 2 yang dikuasai pihak lain dalam hal ini dikuasai oleh ASN yang pensiun tanpa melalui proses penghapusan dengan harga perolehan Rp. 22.000.000,- dan diberi kode M1 (sudah di tarik). Aset daerah pada KIB B yang hilang senilai Rp. 78.683.000,- dan diberi kode M7.Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) maka permasalahan aset daerah dengan kode masalah M1 sudah ditarik kembali oleh Bendahara Barang KESBANGPOL Kabupaten TTU, sedangkan masalah

aset daerah dengan kode M2 terjadi selisih nilai aset daerah antara pelaporan hasil inventarisasi KESBANGPOL Kabupaten TTU dan BKA Kabupaten TTU. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten TTU, selisih nilai aset daerah terjadi karena aset daerah yang hilang dihitung secara gelondongan dengan aset daerah yang ada. Sedangkan untuk aset daerah dengan kode masalah M2 tidak memiliki dokumen kepemilikan karena ada beberapa hal antara lain adanya perpindahan kantor beberapa kali, adanya pergantian Bendahara Barang setiap tahun, cara penyimpanan dokumen yang kurang baik. Berikut data BMD KESBANGPOL KAB. TTU Tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.

Data Aset BMD Badan KESBANGPOL TTU Tahun 2020.

No	Nama Aset	jumlah	tahunPerolehan	Status		Kode Masalah
				Bermasalah	Tidak Bermasalah	
1	TV Warna 17" inci	1	1997	√	-	M2
2	Fax Mile	2	1997	√	-	M2
3	Warles	1	2001	√	-	M2
4	Aipon	1	2002	√	-	M2
5	Meja Kerja	3	2002	√	-	M2
6	KursiPlastik	14	2005	√	-	M2 dan M13
7	Suzuki Thunder	1	2006	-	√	-
8	Suzuki Thunder	1	2006	√	-	M1
9	Suzuki EN 125	1	2006	√	-	M16
10	Honda Mega Pro	1	2010	√	-	M2
11	Kain Gorden	1	2010	√	-	M2
12	mari Perpustakaan	1	2010	√	-	M2
13	Lemari Arsip	2	2010	√	-	M2
14	Meja Kerja	1	2010	√	-	M2
15	Kursi Kayu	1	2010	√	-	M7
16	Lemari Arsip	1	2010	√	-	M2
17	Lemari RakArsip	1	2010	√	-	M2
18	Memori 8 GB	2	2012	√	-	M7
19	Tas Handycame	2	2012	√	-	M7
20	Handycame (1 unit RB dan 2 unit hilang)	4	2012	√	-	M7 dan M10
21	Tas Kamera	4	2012	√	-	M7
22	Memory Camera 4 GB	4	2012	√	-	M7
23	Lemari Arsip	2	2012	√	-	M2
24	Meja Biro	9	2012	√	-	M2
25	KursiPutar Tangan	4	2012	√	-	M2 dan M13
26	Kursi Kayu	1	2012	√	-	M2 dan M13
27	toyota Rush GM/T	1	2013	-	√	-
28	Yamaha Byson	1	2013	-	√	-
29	Lap Top	1	2013	-	√	-
30	Lap Top (1 unit rusakberat)	3	2014	√	-	M10
31	Printer (2 unit hilang dan 2 unit lainrusakberat)	4	2014	√	-	M7 dan M10
32	Hardisk (1 buahhilang)	3	2014	√	-	M7
33	Hardisk (1 buah hilang)	3	2014	√	-	M10
34	Mesin Tik	1	2014	√	-	M2
35	Printer	2	2015	-	√	-
36	Komputer	2	2015	-	√	-
37	Meja	12	2015	-	√	-
38	Buku Bacaan	22	2016	-	√	-
39	Lap Top	2	2017	-	√	-
40	UPS/stabilizer	2	2017	-	√	-

41	Infocus	1	2017	-	√	-
42	Warles	1	2018	-	√	-
42	Handy Came	2	2018	-	√	-
44	Papan Data	7	2018	-	√	-
45	Viar	2	2019	-	√	-
46	Yamaha Freego	1	2019	-	√	-
47	Air Conditioner (AC)	1	2020	-	√	-
48	Irigasi	1		√	-	M2 dan M7
Jumlah		141				

Sumber : Badan Kesbang dan Politik Kabupaten TTU, 2021

Dari Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa untuk mengefektifkan penggunaan SIMDA-BMD maka aset BMD yang memiliki kode masalah dapat diinput pada aplikasi tersebut pada tahun 2020 sesuai dengan kode masalah setiap jenis barang. Sedangkan untuk BMD peralatan dan mesin yaitu 1 (satu) unit motor Suzuki EN 125 dengan kode masalah M16 dihapus karena sudah diserahkan kepada masyarakat dan 1 (satu) unit Irigasi dengan kode masalah M2 dan M7 (tidak memiliki dokumen kepemilikan dan tidak ditemukan), belum diinput ke Aplikasi SIMDA-BMD karena tidak memiliki data lengkap berupa dokumen kepemilikan, tahun pengadaan, lokasi dan ukuran pada waktu pelaksanaan kegiatan inventarisasi aset BMD. Irigasi tersebut merupakan aset yang sumber anggarannya dari penanggulangan bencana daerah, disalurkan melalui rekening milik Badan KESBANGPOL karena OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum terbentuk di Kabupaten TTU dan baru terbentuk pada tahun 2010. Pimpinan Badan KESBANGPOL dan pengelola barang sudah melakukan penelusuran atas aset dimaksud dan mengirimkan surat keterangan ke BKA agar mengeluarkan Irigasi tersebut dari pencatatan data aset Badan KESBANGPOL Kabupaten TTU, sehingga tidak menjadi temuan BPK pada waktu melakukan audit. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dalam pengelolaan aset dan barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Dengan penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang Efektivitas Penggunaan SIMDA-BMD Dalam Pengelolaan Aset Dan Barang Pada Badan KESBANGPOL Kabupaten TTU. Fokus penelitian ini yaitu relevan, kecepatan, lengkap, akurat dan dapat diuji kebenarannya. Informan dalam penelitian ini yaitu pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU dan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU. Penelitian ini menggunakan model analisa data Interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015:246) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dalam pengelolaan aset dan barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara khususnya berkaitan dengan relevan ditemukan bahwa aplikasi SIMDA-BMD cukup efektif untuk digunakan dalam pengelolaan aset dan barang di Kantor Badan KESBANGPOL Kabupaten TTU. Hal ini dapat dilihat dari bentuk aplikasi yang relevan dengan kebutuhan dan cukup membantu. Namun ada beberapa masalah dalam penggunaannya yaitu sebagian aset dan barang belum teridentifikasi secara baik karena masih manual.

Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal pelayanan publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat. Menurut Handoko (2009:23) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang

telah ditetapkan. Salah satu manajemen asset dan barang dilakukan melalui SIMDA-BMD. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang dimaksud Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dari perolehan lainnya yang sah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dewi (2014) menyebutkan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah adalah sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah daerah menghasilkan informasi keuangan yang relevan. Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Aset juga dapat meningkatkan kinerja organisasi dan berpengaruh signifikan terhadap penguatan sistem pengendalian intern (Arifin & Wulandari, 2014). Kecanggihan dari aplikasi teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas implementasi Sistem Informasi Akuntansi (Ratnaningsih&Suaryana, 2014). Tangkilisan (2005:138) menjelaskan efektifitas yang dikaitkan dengan suatu organisasi bahwa suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang dapat ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian dan bahasan teori diatas dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini relevan dan sangat efektif dalam penggunaan untuk mencapai tujuan organisasi. seperti yang diungkapkan oleh Tangkilisan bahwa efektifitas "Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang dapat ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan kecepatan ditemukan bahwa belum ada SOP khusus berkaitan dengan penggunaan SIMDA-BMD. Dan yang digunakan dalam pengelolaannya adalah buku panduan pengisian. Buku panduan cukup detail sehingga memudahkan pengelola dalam melakukan pelaporan. Selain itu juga ada beberapa data yang belum cepat terinput dipengaruhi oleh sebagian data asset masih bersifat manual dan masih menindaklanjuti temuan BPK. Penggunaan sistem informasi manajemen yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi menuntut tersedianya beberapa komponen utama seperti (1) perangkat keras (*hardware*) yaitu komputer yang memadai baik secara kuantitas dan terutama secara kualitas (canggih dan handal) untuk pengolahan data; (2) perangkat lunak (*software*) yaitu program atau instruksi yang diberikan oleh *programmer* kepada computer untuk melakukan pekerjaan tertentu; dan (3) para pekerja otak (*brainware*) yakni sumber daya manusia yang profesional atau memiliki kualifikasi atau kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) yang diperlukan di bidang pengelolaan sistem informasi (Siagian, 2009). O'Brien mengatakan bahwa sistem informasi merupakan suatu kombinasi dari setiap unit yang dikelola oleh *user* atau manusia, *hardware* (perangkat keraskomputer), *software* (perangka lunak), jaringan komputer dan jaringan komunikasi data (komunikasi), dan juga *database* (basis data) yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi tentang suatu organisasi. Jadi, pada dasarnya, sistem informasi memang harus memiliki elemen-elemen tersebut agar dapat berguna dan juga bekerja dengan optimal. (John Nash dan Robert, 1998 dalam Sudaya) mengatakan bahwa sistem informasi merupakan kombinasi dari user atau orang, teknologi, media, prosedur, dan juga pengendalian, yang memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan atau memperoleh jalur komunikasi, memproses tipe transaksi, dan memberi sinyal kepada manajemen terhadap kejadian internal di dalam suatu organisasi. Davis (1991) mengatakan bahwa suatu sistem informasi adalah sebuah sistem yang menerima input data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Dengan begitu, maka bisa disimpulkan bahwa suatu sistem informasi memiliki alur tertentu, mulai dari input hingga menjadi output yang bermanfaat. Sistem informasi cukup efektif dalam membantu sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut

berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang ditentukan oleh organisasi tersebut.

Hasil penelitian berkaitan dengan efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dalam pengelolaan aset dan barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara ditemukan bahwa aplikasi SIMDA-BMD cukup efektif dalam membantu pengelolaan aset dan barang karena cukup akurat. Namun perlunya pemutakhiran aplikasi tersebut dari offline ke online sehingga apabila ada perubahan aset dan barang karena adanya perbaikan dapat diperbaharui secara berkala. Selain itu juga adanya faktor *human error* maka data yang diinput terkadang belum akurat. Nugraha dan Astuti (2013) menyebutkan beberapa pengendalian yang telah diterapkan dalam aplikasi SIMBADA Keuangan diantaranya a. Pengendalian akses dan wewenang pemakai, pembatasan akses kedalam aplikasi SIMBADA dengan akun dan kata kunci serta pembagian kewenangan seperti administrator, supervisor dan operator, b. pengendalian keamanan yang dilakukan dengan penggunaan *uninterruptible power supply* pada komputer sebagai pengaman daya, c. pengendalian berdasarkan fungsi-fungsi menu secara terintegrasi kedalam sistem untuk menjamin validitas masukan data. Pengendalian aplikasi yang terdiri dari pengendalian masukan untuk mengetahui kesalahan dalam memasukkan data, pengendalian proses untuk memastikan bahwa pemrosesan data telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan pengendalian keluaran yang bertujuan untuk menjamin *output* yang dihasilkan benar dan akurat. Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Berdasarkan hasil penelitian dan bahasan teori diatas dapat disimpulkan aplikasi SIMDA-BMD cukup efektif karena produktif dan mempermudah penggunaannya.

Hasil penelitian berkaitan dengan efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dalam pengelolaan aset dan barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara khususnya aspek lengkap ditemukan bahwa aplikasi SIMDA-BMD terbaru cukup lengkap dan memenuhi kebutuhan penerapan basis akrual sesuai PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP No.24 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Menurut Richard M. Steers (1999:53) kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya pegawai dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan

pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan hasil penelitian dan bahasan teori dapat disimpulkan bahwa adanya kejelasan strategi dimana aplikasi SIMDA-BMD cukup lengkap dan menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

Hasil penelitian tentang efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dalam pengelolaan aset dan barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara khususnya aspek dapat diuji kebenarannya disimpulkan bahwa aplikasi SIMDA-BMD memiliki sistem proteksi data yang baik dan sesuai dengan peraturan perbendaharaan dan keuangan nasional. Selain itu juga aplikasi ini valid karena sering dilakukan pembaharuan sistem secara berkala. Aplikasi mudah dan cepat dalam penginputan serta data yang diinput langsung diberi peringatan apabila tidak cocok agar tidak adanya kesalahan dalam penginputan. Suatu sistem informasi berbasis computer memerlukan beberapa pengendalian intern untuk menjamin bahwa sistem yang telah dirancang dapat digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang diharapkan. Ahmad, et. al (2013) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa pengendalian *input* merupakan pengendalian yang paling penting untuk mendukung kesuksesan suatu sistem informasi akuntansi. Hall (2011) menyatakan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengendalian sistem informasi berbasis computer antara lain:

- a. Pengendalian internet dan intranet yang meliputi pengendalian risiko dari ancaman subversif seperti pembajak/*hacker* dapat diaplikasikan dengan penerapan *firewall*, dan enkripsi. Sedangkan pengendalian risiko dari kegagalan peralatan dalam sistem komunikasi dapat dilakukan dengan prosedur akuisisi *hardware*, prosedur pengendalian virus, keamanan fisik database, dan prosedur *backup*.
- b. Pengendalian pertukaran data elektronik meliputi otorisasi dan validasi transaksi serta pengendalian akses.
- c. Pengendalian aplikasi merupakan prosedur manual terprogram yang dibagi menjadi tiga jenis yaitu pengendalian input, pengendalian proses dan pengendalian output.

Berdasarkan hasil penelitian dan bahasan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi SIMDA-BMD memiliki system pengendalian risiko dari ancaman subversif seperti pembajak/*hacker* dapat diaplikasikan dengan penerapan *firewall*, dan enkripsi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal berdasarkan sub fokus penelitian diantaranya:

1. Relevan
Aplikasi SIMDA-BMD cukup efektif untuk digunakan dalam pengelolaan Aset dan Barang di Kantor Badan Kesbangpol. Hal ini dapat dilihat dari bentuk aplikasi yang relevan dengan kebutuhan dan cukup membantu. Namun ada beberapa masalah dalam penggunaannya yaitu sebagian aset dan barang belum teridentifikasi secara baik karena datanya masih manual.
2. Kecepatan
Belum ada SOP khusus berkaitan dengan penggunaan SIMDA-BMD. Dan yang digunakan dalam pengelolaannya adalah buku panduan pengisian. Buku panduan cukup detail sehingga memudahkan pengelola dalam melakukan pelaporan. Selain itu juga ada beberapa data yang belum cepat terinput dipengaruhi oleh sebagian aset datanya masih bersifat manual dan masih menindaklanjuti temuan BPK.
3. Akurat
Aplikasi SIMDA-BMD cukup efektif dalam membantu pengelola aset dan barang karena cukup akurat. Namun perlunya pemutakhiran aplikasi tersebut dari offline ke online sehingga apabila ada perubahan aset dan barang karena adanya perbaikan dapat diperbaharui secara berkala. Selain itu juga adanya faktor *human eror* maka data yang diinput terkadang belum akurat.
4. Lengkap
Aplikasi SIMDA-BMD terbaru cukup lengkap dan memenuhi kebutuhan penerapan basis akrual sesuai PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP No.24 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

5. Dapat diuji kebenarannya

Aplikasi SIMDA-BMD memiliki sistem proteksi data yang baik dan sesuai dengan peraturan perbendaharaan dan keuangan nasional. Selain itu juga aplikasi ini valid karena sering dilakukan pembaharuan sistem secara berkala. Aplikasi mudah dan cepat dalam penginputan serta data yang diinput langsung diberi peringatan apabila tidak cocok agar tidak ada kesalahan dalam penginputan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Muhammad. Ayasra, Ahmad. Zaideh, Farah. (2013). *Issues and Problems Related to Data Quality in AIS Implementation. International Journal of Latest Research in Science and Technology*. Vol. 2 Issue. 2 Page 17 – 20.
- Alfian, Mohammad. (2014). *Analisis Faktor Pendukung Implementasi SIMBADA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD* (Penelitian pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo). 3rd Economics & Business Research Festival. Hal. 1698 – 1712.
- Anisya, Septi Wulandari. Iwan, Setya Putra. (2014). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Dengan Metode Technology Acceptance Model Pada Pemerintah Kabupaten Blitar*. Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Vol. 2, No. 2 (2015). ISSN: 2407-2680.
- Arifin, Wiwin dan Wulandari, Ayu. (2014). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Sebelum dan Sesudah Penerapan SIMAK BMN pada Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang* di Lingkungan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten. *Jurnal Akuntansi*. Vol 1. No. 1 Hal. 1-74.
- Atik & Ratminto. (2012). *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Baedhowi. (2004). *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan*. Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta, Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia: Jakarta.
- Bodnar and Hopwood. (2006). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 9. ANDI: Yogyakarta.
- BPKP. (2015). *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)*. Retrieved from: <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp>; Dunn, William N., 2003, *Penerjemah Samodra Wibawa dkk., Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press.
- Dewi, Andini Kusuma. (2014). *Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Aplikasi SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) Terhadap Kepuasan Pengguna Akhir*. (Studi Kasus pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau).
- Kemenristek. (2006). *Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2005-2024*. Available from: *Jurnal Komunikasi KAREBA* Vol. 5 No.1 Januari - Juni 2016 128 http://directory.umm.ac.id/tik/buku_putih_bidang_tik.pdf
- Lulu, M., Lassa, A., Uskono, N., & Aplonia, A. (2020). *Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara*. *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)*, 1(2), 150-169. Retrieved from <https://jsk.kodepena.org/index.php/jsk/article/view/39>
- Nugraha, Adi Harmadhani dan Astuti, Yuli Widi. (2013). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMBADA) dalam Pengolahan Data Keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah* (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk). Vol.2 No.1 Hal. 23-33.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*;
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*;
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Rorimpandey, Ariel. Nangoy, Grace B. Manossoh, Hendrik. (2017). *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014* Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. <https://media.neliti.com/media/publications/71565-ID-analisis-pengelolaan-barang-milik-daerah.pdf>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia..